

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi nasional dan daerah. Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menjadi landasan hukum utama dalam pengembangan pariwisata nasional. Undang-undang ini menggeser fokus dari industri ke ekosistem pariwisata berbasis kualitas, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat lokal, menekankan tata kelola terpadu, destinasi berkelanjutan dengan hak masyarakat lokal, serta pemasaran digital yang modern. Poin-poin utama dalam UU No. 18 tahun 2025 diantaranya: 1). Pergeseran paradigma: mengubah konsep dari “industri” menjadi “ekosistem kepariwisataan” yang holistik dan terintegrasi. 2). Pembangunan berkualitas: menekankan pariwisata yang berkualitas, inklusif, adaptif, inovatif, berkelanjutan dan berdaya saing global. 3). Tata kelola baru: memperkenalkan bab baru mengenai perencanaan, pembangunan destinasi pariwisata, serta pemasaran modern berbasis data. 4). Berfokus pada kesejahteraan: memperkuat pariwisata sebagai pilar pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat lokal. 5). Asas kepariwisataan: tetap berlandaskan asas-asas seperti manfaat, kekeluargaan, keadilan, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipasi, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan dan kesatuan.

Dalam pengembangan kepariwisataan nasional, kualitas destinasi dan pengalaman wisatawan merupakan unsur penting dalam mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, konsep Sapta Pesona dikembangkan sebagai

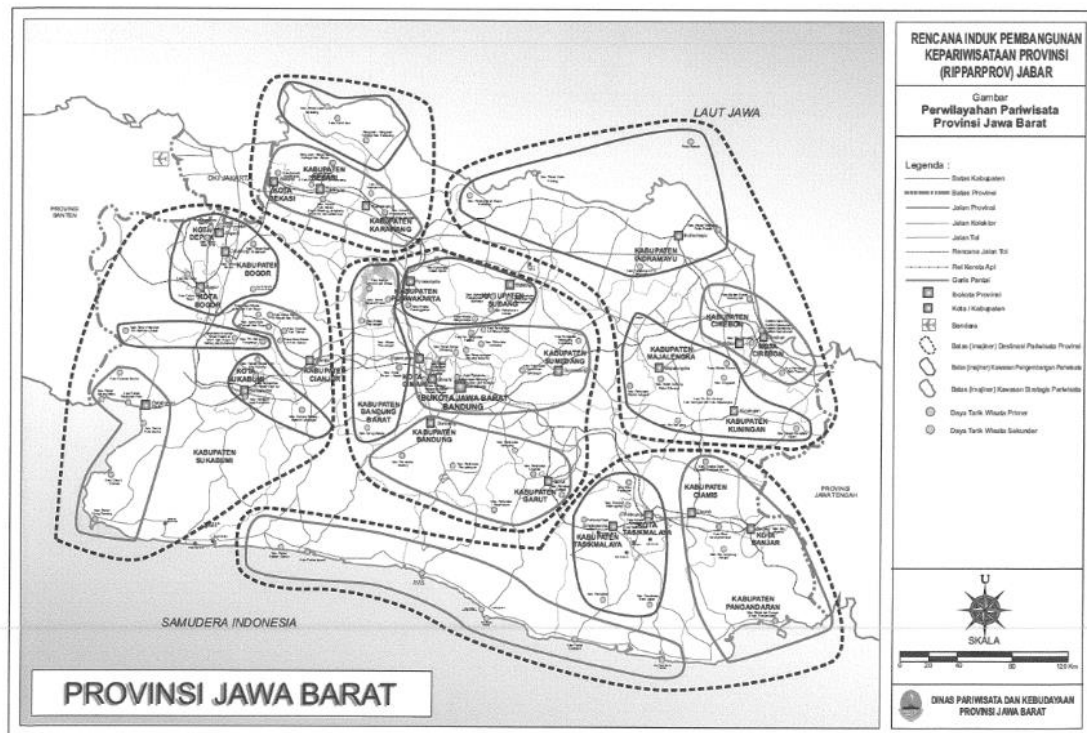
pendekatan operasional dalam mendukung penyelenggaraan pariwisata di Indonesia. Sapta Pesona mencakup unsur: Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah, dan Berkesan, yang berfungsi sebagai pedoman dalam menciptakan kondisi destinasi yang kondusif dan berdaya saing. Salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata adalah Provinsi Jawa Barat.

Provinsi Jawa Barat, sebagai salah satu destinasi utama di Indonesia, memiliki keunggulan geografis, kekayaan alam, dan budaya yang beragam, hal ini memberikan peluang besar untuk mendorong pengembangan pariwisata berkelas dunia. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis, salah satunya melalui program Pengembangan Kawasan Wisata Unggulan. Dalam Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat No. 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025 Pengembangan Kawasan Wisata Unggulan (KWU) Provinsi adalah kawasan pariwisata dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter produk dan tema pengembangan pariwisata alam, budaya dan buatan. KWU bertujuan menciptakan destinasi wisata yang berdaya saing tinggi, berkelanjutan, serta mampu menarik wisatawan baik di tingkat nasional maupun internasional.

Pengembangan pariwisata di Provinsi Jawa Barat direncanakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam dan sosial. Prinsip ini diwujudkan dalam integrasi pembangunan pariwisata dengan kelestarian lingkungan alam, budaya, serta kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, konsep pembangunan pariwisata tidak hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya, tetapi juga mempertimbangkan daya dukung ekosistem.

Dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat (RIPPARPROV) tahun 2016-2025 telah membagi pariwisata Provinsi Jawa Barat menjadi 5 (lima) Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) yaitu: 1). Destinasi Pariwisata Karawang – Bekasi dan sekitarnya dengan pusat DPP adalah Kabupaten Bekasi. 2). Destinasi Pariwisata Cirebon Raya dan sekitarnya dengan pusat DPP adalah Kota Cirebon. 3). Destinasi Pariwisata Cekungan Bandung dan sekitarnya dengan pusat DPP adalah Kota Bandung. 4). Destinasi Pariwisata Bogor-Cianjur-Sukabumi dan sekitarnya dengan pusat DPP adalah Kota Bogor. 5). Destinasi Pariwisata Jawa Barat Selatan dan sekitarnya dengan pusat DPP adalah Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan pariwisata Jawa Barat dan yang terkait, bentuk-bentuk perwilayahan pariwisata yang membagi habis wilayah administratif ke dalam Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPW), Satuan Kawasan Wisata (SKW), dengan *cluster* Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) dirasakan kurang efektif karena tidak atau kurang memberikan arahan yang jelas untuk mengimplementasikan perencanaan pariwisata di tingkat provinsi. Oleh karena itu, pengembangan Destinasi Wisata Kelas Dunia Provinsi Jawa Barat ini menganut konsep pengembangan berjenjang dan unggulan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1.

Perwilayahan Pariwisata Provinsi Jawa Barat

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Barat

Pada gambar diatas, pengembangan destinasi wisata kelas dunia Jawa Barat difokuskan pada Pengembangan Kawasan Wisata Unggulan (KWU) Provinsi. KWU Provinsi Jawa Barat dikelompokkan berdasarkan faktor-faktor pengikat kawasan, serta konsep dan teori dalam pengembangan kawasan wisata. Lebih lanjut, identifikasi potensi dan permasalahan masing-masing KWU Provinsi merupakan dasar dalam penyusunan prioritas program pengembangan yang sesuai untuk masing-masing kawasan tersebut.

Salah satu yang menjadi bagian dari Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) Cirebon Raya adalah Kabupaten Kuningan, sebagai bagian dari Jawa Barat, Kabupaten Kuningan memiliki potensi wisata yang signifikan dengan keindahan alam, ekowisata, serta warisan budaya yang kaya. Mengacu kepada Peraturan Bupati Kuningan Nomor

90 tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) Tahun 2020-2028, bahwa potensi kepariwisataan di Kabupaten Kuningan perlu dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembangunan kepariwisataan, hal ini selaras dengan Visi Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kuningan adalah mewujudkan kabupaten sebagai destinasi pariwisata alam dan budaya yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Kabupaten Kuningan memiliki banyak potensi yang sudah berkembang maupun yang bisa dikembangkan dan faktor penunjang bagi perkembangannya. Potensi wisata tersebut diantaranya: Objek Desa Wisata Cibuntu, Objek Wisata Kawasan Palutungan, Kebun Raya Kuningan, Telaga Biru Cicerem, Curug Putri, Gedung Sejarah Perundingan Linggarjati, Gunung Ciremai, Waduk Darma dan masih banyak objek wisata lainnya yang masih dalam tahap pengembangan. Faktor-faktor penunjang lainnya antara lain meliputi: Kabupaten Kuningan dekat dengan Bandara Internasional Kertajati Majalengka, jasa penginapan dan restoran, sarana transportasi jalur lintas yang strategis yang menghubungkan kota-kota besar di Jawa Barat: Kab/Kota Cirebon, Indramayu, Majalengka, Ciamis-Pangandaran, Bandung dan Cilacap Jawa Tengah, serta sarana komunikasi yang memadai. Pengembangan terhadap sektor ini telah menyumbangkan sejumlah penambahan bagi pendapatan daerah.

Pemerintah Kabupaten Kuningan telah berupaya untuk mengembangkan pariwisata dengan berbagai inisiatif, termasuk pembangunan infrastruktur, promosi destinasi wisata, serta pelibatan masyarakat dalam industri pariwisata sesuai dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor: 90 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) tahun 2020-2028. Namun, dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata, terdapat berbagai tantangan

yang perlu diatasi. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Kuningan menuju pariwisata kelas dunia antara lain: 1). Kurangnya Infrastruktur Pendukung: Ketersediaan aksesibilitas yang terbatas, fasilitas akomodasi yang belum memadai, serta kualitas layanan yang masih perlu ditingkatkan menjadi hambatan utama dalam menarik wisatawan internasional. 2). Promosi dan Branding yang Kurang Optimal: Kabupaten Kuningan masih menghadapi tantangan dalam membangun citra sebagai destinasi wisata kelas dunia akibat kurangnya strategi pemasaran yang efektif dan pemanfaatan teknologi digital. 3). Kurangnya SDM Pariwisata yang Kompeten: Pelaku industri pariwisata, termasuk pemandu wisata dan pengelola destinasi, masih perlu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam standar layanan internasional. 4). Belum Optimalnya Sinergi Antar Pemangku Kepentingan: Kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata belum berjalan secara maksimal. 5). Keberlanjutan Lingkungan dan Kearifan Lokal: Tantangan dalam menjaga keseimbangan antara eksploitasi pariwisata dan pelestarian lingkungan serta budaya lokal masih menjadi isu yang perlu diatasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Kuningan belum sepenuhnya diimplementasikan dengan baik.

Kebijakan merupakan sebuah instrumen pokok yang dapat dipakai untuk memecahkan berbagai permasalahan publik (*public affairs*). Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2008:146) mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-

keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Wilson (2006:154) Kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan atau tujuan-tujuan dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah/sedang di ambil (gagal di ambil) untuk di implementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (tidak terjadi). Sebuah kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila dapat diimplementasikan, sebaliknya kebijakan akan menjadi sebuah impian atau rencana yang baik dan tersusun rapi manakala tidak di implementasikan, Chief J.O Udoji (dalam Abdoellah & Rusfiana, 2020:179).

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan-tujuan tertentu untuk kepentingan seluruh masyarakat. Kebijakan publik secara umum dapat dijelaskan sebagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yakni berupa tindakan-tindakan pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu serta mengutamakan kepentingan masyarakat (Islamy, 2000:23).

Studi kebijakan publik berusaha untuk meninjau berbagai teori dan proses yang terjadi dalam kebijakan publik. Berarti bahwa kebijakan publik tidak terlepas dari proses pembentukan kebijakan itu sendiri. Dengan demikian, studi kebijakan publik bertujuan untuk menganalisis bagaimana tahapan demi tahapan proses pembentukan kebijakan publik tersebut sehingga terwujudlah suatu kebijakan publik tertentu. Dalam perkembangannya, kebijakan di sektor pariwisata masuk ke dalam domain kajian ilmu kebijakan yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Sektor pariwisata merupakan motor penggerak dalam distribusi perekonomian khususnya di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Januari samapi dengan November 2024

pertumbuhan sektor industri pariwisata terus mengalami peningkatan yaitu sekitar +19% dibanding tahun 2023, sektor pariwisata turut menyumbang pemaskan sekitar US\$ 12,63 miliar atau berkontribusi sekitar 4,01% Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional. Berikut adalah tabel pertumbuhan ekonomi pada sektor pariwisata:

Tabel 1.1.
Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata Indonesia
Sumber: Kementerian Pariwisata, 2024

Indikator	2023	2024
Wisman (juta)	-11,7	13,9 (+19 %)
Kontribusi PDB (%)	3,9	4,01 (smt I 2024)
Devisa sampai Q3 (US\$ miliar)	—	12,63
Tenaga kerja (juta orang)	24,41	25,01 (+2,5 %)
TPK hotel bintang (April)	-41,4 %	47,14 %

Pariwisata sebagai *core economy*, kini menjadi tujuan bersama, tidak hanya segenap insan kemenpar, tapi juga seluruh bangsa Indonesia. Dalam beberapa tahun ke depan kita akan bertransformasi menjadi sebuah negara besar yang sebegini ekonominya di dukung sektor pariwisata. Laporan *World Travel and Tourism Council* (WTTC) juga menambahkan bahwa di kebanyakan negara, wisata pesisir merupakan industri wisata terbesar dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi Produk Domestik Bruto (PDB). Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), selanjutnya pada pasal 2 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2000, Jenis Pajak Kabupaten dan Kota. Dalam buku (Prof. Carunia Mulya Firdausy, MADE, Ph.D : 2017) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Hal ini karena PAD menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, yaitu melaksanakan pelayanan publik (*public service function*), dan melaksanakan pembangunan (*development function*).

PAD Jawa Barat pada tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp. 36,27 triliun, yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Akan tetapi berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 sebesar Rp. 25.192,89 Triliun sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.2.
Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2022 – 2024*
Sumber: <https://jabar.bps.go.id>

LAMPIRAN 1.A REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT MENURUT JENIS PENERIMAAN 2022-2024 (MILYAR RUPIAH)		Provinsi Jawa Barat		
Uraian		2022	2023	2024*
[1]		[2]	[3]	[4]
A	PENDAPATAN DAERAH	33.232,27	27.795,07	35.918,60
1	PAD	23.249,62	22.111,57	25.192,89
1.1	Pajak Daerah	21.542,60	20.482,10	23.426,51
1.2	Retribusi Daerah	44,84	32,61	699,47
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	468,99	534,09	406,23
1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	1.193,19	1.062,77	660,68
2	TKDD	9.860,66	5.618,90	10.696,48
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	9.860,66	5.618,90	10.696,48
3	PENDAPATAN LAINNYA	121,99	64,60	29,23
3.1	Pendapatan Hibah	39,77	0,00	29,23
3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	53,77	64,60	0,00
3.3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	28,45	0,00	0,00
B	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	2.635,60	2.335,85	1.433,36
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.575,01	2.335,39	997,15
2	Penerimaan Pinjaman Daerah	60,53	0,00	0,00
3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,06	0,00	0,00
4	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,46	436,21
TOTAL		35.867,87	30.130,92	37.351,96

*APBD

Menurut Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (data 2021) dari BAPPEDA Kab. Kuningan memperoleh kategori perlu perbaikan dengan nilai indeks 65,85 poin, termasuk di antara sejumlah kabupaten dengan kategori serupa di Jawa Barat, meskipun peringkat keuangan daerahnya berada di bawah kota-kota besar dan wilayah unggulan,

penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kesepuluh kalinya menunjukkan kemajuan dalam tata kelola fiskal. Sementara itu, Pendaatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuningan pada tahun 2024 mengalami peningkatan. Laporan APBD Kabupaten Kuningan tahun 2024 menunjukkan target pendapatan daerah sebesar Rp. 438,99 Milyar. Berikut adalah tabel Pendapatan Asli Daerah Kab. Kuningan:

Tabel 1.3.
Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Kuningan 2022 – 2024*
Sumber: <https://jabar.bps.go.id>

LAMPIRAN 10.A REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN MENURUT JENIS PENERIMAAN 2022-2024 (MILYAR RUPIAH)				
Uraian		Kabupaten Kuningan		
		2022	2023	2024*
[1]		[2]	[3]	[4]
A PENDAPATAN DAERAH		2.679,68	2.842,02	2.890,53
1 PAD		312,75	305,98	438,99
1.1	Pajak Daerah	107,68	122,61	212,98
1.2	Retribusi Daerah	77,25	55,69	32,17
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,14	6,67	8,00
1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	120,68	121,01	185,84
2 TKDD		2.072,36	2.124,50	2.246,70
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.072,36	2.124,50	2.246,70
3 PENDAPATAN LAINNYA		294,57	411,54	204,84
3.1	Pendapatan Hibah	9,76	5,29	0,00
3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	33,85	44,38	43,20
3.3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	250,96	361,87	161,64
B PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH		65,27	72,30	92,52
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	65,27	15,91	71,42
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	38,99	0,00
3	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	17,40	21,10
TOTAL		2.744,95	2.914,32	2.983,05
*APBD				

Dari data tersebut menunjukkan bahwa Retribusi Daerah mengalami penurunan sejak tahun 2022 sebesar 77,25, dan pada tahun 2023 sebesar 55,69 Milyar, menjadi 32,17 Milyar pada tahun 2024. Pendapatan Asli Daerah sangat mempengaruhi berbagai

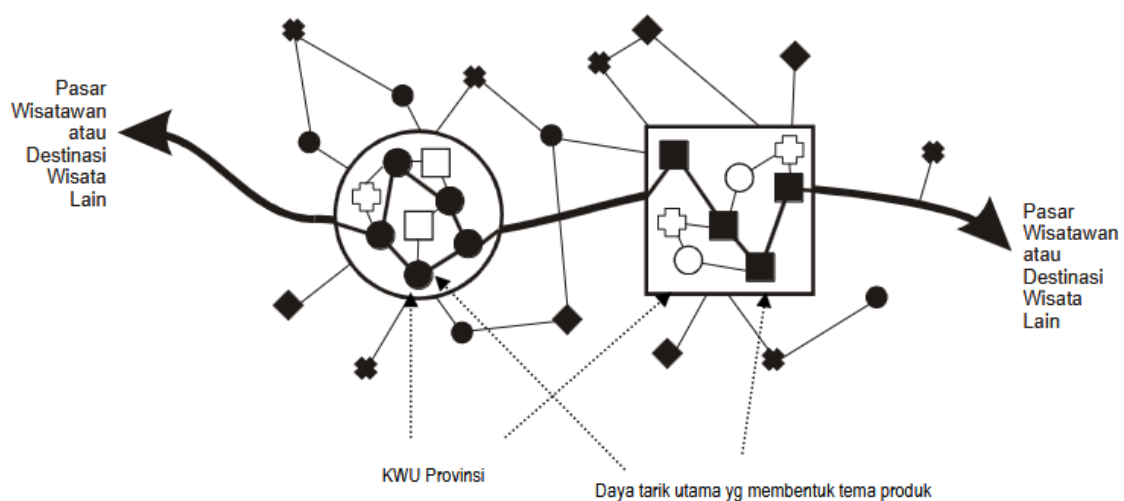
sektor, terutama berdampak kepada pertumbuhan ekonomi, belanja modal, penanggulangan kemiskinan, penyediaan layanan publik, pengembangan pariwisata dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Pengembangan pariwisata memiliki peran krusial dalam meningkatkan jumlah pengunjung dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah, sehingga pengembangan pariwisata yang terencana dan berkelanjutan sangat penting untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkesinambungan. Hal ini memerlukan kerja sama dari berbagai pihak termasuk pemerintah, masyarakat dan pelaku pariwisata untuk memastikan bahwa pariwisata dapat memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak.

Dalam studi yang dilakukan oleh Fitri Abdillah (2016:46) yang berjudul *"Local Community Involvement and Quality of Life in Tourism Destination Development: Case of Coastal Tourism in West Java, Indonesia"*, ditemukan bahwa peningkatan jumlah kunjungan wisata secara signifikan terhubung dengan kualitas pelibatan komunitas dan peningkatan taraf hidup masyarakat setempat. Penelitian tersebut membandingkan dua destinasi pantai di Jawa Barat yaitu Pangandaran dan Palabuhan Ratu, mengungkapkan bahwa Pangandaran berada pada fase pertumbuhan (*growth phase*) yang ditandai oleh naiknya jumlah wisatawan dan meningkatnya kontribusi ekonomi lokal, sementara Palabuhan Ratu cenderung berada di fase konsolidasi (*consolidation phase*). Intervensi ini memengaruhi empat dimensi kualitas hidup: material, spiritual, sosial, dan pribadi dengan dampak terbesar terlihat pada aspek material.

Temuan Abdillah relevan secara langsung dengan penelitian ini karena menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat tidak hanya memperkuat keberlanjutan destinasi wisata, tetapi juga memberikan efek positif terhadap kesejahteraan lokal. Dalam konteks Kabupaten Kuningan, yang sedang dikembangkan sebagai pengembangan Kawasan Wisata Unggulan (KWU), hasil penelitian ini

mempertegas pentingnya strategi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*). Artinya, pelibatan komunitas secara intensif bukan hanya meningkatkan kualitas pelayanan wisata, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi yang nyata. Hal ini mendukung proposisi bahwa variabel disposisi pelaksana (*attitude and commitment of actors*) dan lingkungan sosial-ekonomi (*social-economic context*) dalam model Van Meter & Van Horn merupakan faktor penting dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan pariwisata.

Pengembangan Kawasan Wisata Unggulan (KWU) Kabupaten/Kota merupakan kawasan wisata yang diunggulkan di tingkat Kabupaten/Kota yang berperan dalam menjawab isu-isu strategis pembangunan kepariwisataan di tingkat daerah. Pemerintah daerah menjadi pemeran utama pengembangan kawasan ini, khususnya dalam hal pengelolaan daya tarik dan pembinaan masyarakat sekitar kawasan. KWU Kabupaten/Kota dalam perencanaan dan pengelolaannya lebih besar daripada tanggung jawab pemerintah provinsi. Keterkaitan antara KWU Provinsi dengan KWU Kabupaten/Kota maupun daya tarik wisata yang terdapat di wilayah Jawa Barat dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.2.

Hubungan KWU dengan Daya Tarik Wisata Utama

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Barat

Oleh karena itu, dari uraian permasalahan singkat di atas maka penulis ingin meneliti lebih lanjut dan mengajukan judul penelitian sebagai berikut:

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA UNGGULAN PARIWISATA KELAS DUNIA DI JAWA BARAT (Studi Kasus Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Kuningan).

Adapun fokus penelitian yang akan dilakukan di 3 (tiga) lokasi diantaranya: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuningan, Desa Wisata Cibuntu dan Gedung Naskah Linggarjati. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam mengembangkan pariwisata berkelas dunia secara berkelanjutan.

1.2. Rumusan Masalah

1.2.1. *Problem Statement*

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: “Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Wisata Unggulan Pariwisata Kelas Dunia di Jawa Barat (Studi Kasus Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Kuningan) belum maksimal”.

1.2.2. *Problem Questions*

Berdasarkan latar *problem statement* tersebut maka penulis merumuskan *problem questions* sebagai berikut:

- 1) Bagaimana implementasi kebijakan Pengembangan Kawasan Wisata Unggulan (KWU) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam mewujudkan pariwisata kelas dunia?
- 2) Bagaimana bentuk inovasi yang diterapkan dalam pengembangan Kawasan Wisata Unggulan (KWU) untuk meningkatkan daya tarik destinasi wisata di Kabupaten Kuningan?

- 3) Sejauh mana pengembangan Kawasan Wisata Unggulan (KWU) berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Kuningan?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisis implementasi kebijakan Pengembangan Kawasan Wisata Unggulan (KWU) di Kabupaten Kuningan dalam rangka mewujudkan pariwisata kelas dunia.
- 2) Untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk inovasi yang diterapkan dalam Pengembangan Kawasan Wisata Unggulan (KWU) sebagai upaya meningkatkan daya tarik destinasi wisata di Kabupaten Kuningan.
- 3) Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari Pengembangan Kawasan Wisata Unggulan (KWU) terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Kuningan.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Terdapat kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian ini baik secara teoritis dan secara praktis yaitu:

- 1) Kegunaan penelitian secara teoritis:
 - a. Menjadi bahan pengembangan teoritik Ilmu Administrasi Publik, khususnya kebijakan publik.

- b. Menjadi bahan teoritik dalam pembuatan kebijakan dan implementasi kebijakan publik yang berlandaskan pada kepentingan publik.
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan peneliti selanjutnya yang meneliti dan mengkaji permasalahan tentang kebijakan publik.

2) Kegunaan penelitian secara praktis:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan atau sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam membuat skema kebijakan pariwisata di Kabupaten Kuningan menuju Pariwisata Kelas Dunia.
- b. Memberikan informasi kepada *pemangku kebijakan (pemerintah, pengelola pariwisata dan masyarakat* betapa pentingnya pembangunan pariwisata, sehingga mampu memberikan peningkatan di berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.